

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Skripsi



**Nama : Siti Khodijah
NIM : 222013292**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2018**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel
Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Selatan
Nama : Siti Khodijah
NIM : 222013292
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2019

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0206046378/359196

Pembimbing II,



Welly, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0212128102/1085022

Mengetahui
Dekan

u.h. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., AK., M.Si, CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Khodijah

NIM : 222013292

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat ang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, Februari 2019



Siti Khodijah

Abstract

Siti Khodijah/222013292/2019/The Influence of Financial Performance on Economic Growth and the Allocation of Capital Expenditures as an Intervening Variables at Kabupaten/ Kota South Sumatera Province

The problem of this study was how the influence of financial performance on economic growth and the allocation of capital expenditure as an intervening variable at province in Kabupaten/ Kota South Sumatera Province. The purpose of this study was to determine the effect of financial performance on economic growth and the allocation of capital expenditure as an intervening variable at Kabupaten/ Kota South Sumatera Province. The research used by researchers in this study was associative research, It was used to measure the value financial performance on economic growth and the allocation of capital expenditure as an intervening variable at Kabupaten/ Kota South Sumatera Province. The population in this study were all of Kabupaten/ Kota South Sumatera Province consisted of 13 regencies and 4 cities. The sample in this study consists of 17 Kabupaten/ Kota South Sumatera Province for 3 years in 2014-2016, so the sample of this study was 51 samples at Kabupaten/ Kota South Sumatera Province. The secondary data was taken by using literature review method and accessing websites. The technique for collecting data used were interview technique, questionnaires, observation and documentation. The analysis of data used was path analysis. The results of this study prove that there was a significant positive effect of financial performance on economic growth and the allocation of capital expenditure as an intervening variable in Kabupaten/ Kota South Sumatera Province was acceptable.

Keywords: Financial Performance, Economic Growth, the Allocation of Capital Expenditures.



Abstrak

Siti Khodijah / 222013292 / 2019 / Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening provinsi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui nilai pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 13 Kabupaten dan 4 Kota. Sampel dalam penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun berturut, sehingga sampel penelitian ini sebanyak 51 data sampel Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, mengakses website, dan situs-situs, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kuisisioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis jalur. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa “ada pengaruh positif yang signifikan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan” dapat diterima.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Alokasi Belanja Modal

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmadNYA penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: 1) persamaan jalur model 1 pengaruh kinerja keuangan (X) terhadap alokasi belanja modal (Z) diperoleh nilai koefisien β positif yaitu 0,497 artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif, sementara nilai ($P < 0,05$) koefisien jalur variabel lain terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan sebesar 86,78%. Sehingga persamaan jalur model 1 adalah : $Y_2 = 0,497X + 0,8678$. 2) persamaan jalur model 2 pengaruh kinerja keuangan (X) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,720$ pada sig $0,483 > 0,05$, dan $\beta (+) = 0,217$ artinya pengaruhnya tidak signifikan dan positif. Pengaruh alokasi belanja modal (Z) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,556$ pada sig $0,587 > 0,05$, dan $\beta (+) = 0,168$ artinya pengaruhnya positif dan tidak signifikan. Nilai ($P < 0,05$) koefisien jalur variabel lain terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota

provinsi Sumatera Selatan sebesar 98,03%. Sehingga persamaan jalur model 2 adalah : $Y_1 = 0,217X_1 + 0,168Y_2 + \epsilon 0,9803$. Jadi, kinerja keuangan terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda (Maryono) tercinta dan Ibunda (Surgiah) terkasih yang selalu memberikan do'a restu, bimbingan, semangat dan dorongan baik moral maupun material, serta nasehat-nasehat yang membangun kepada penulis demi kelancaran dan kesuksesanku

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si., CA dan Ibu Welly, S.E., M.Si. yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

- a. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- b. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
- c. Bapak Betri Sirojuddin, SE., M.Si, AK. CA dan Bapak Mizan, SE., M.Si, AK. CA selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- d. Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku pembimbing akademik
- e. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

f. Pegawai Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan yang telah membantu dalam pengumpulan data.

g. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin

Palembang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	
.....	xvi
ABSTRACT	
.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Bagi Penulis.....	8
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	9
3. Bagi Almamater	9

**BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN,
DAN HIPOTESIS**

A. Landasan Teori	10
1. Pengertian Kinerja Keuangan.....	10
2. Parameter Rasio Keuangan Kinerja Keuangan	11
3. Pengukuran Kinerja Keuangan.....	14
4. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
5. Pengertian Alokasi Belanja Modal.....	16
6. Katagori Belanja Modal	18
7. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	19
8. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi.....	21
B. Penelitian Sebelumnya	21
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Hipotesis.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Operasional Variabel.....	26
D. Populasi dan Sampel	27
1. Populasi	27
2. Sampel.....	28
E. Data yang Diperlukan.....	29

1. Sumber Data Primer	29
2. Data Sekunder	29
F. Metode Pengumpulan Data	29
1. Interview (Wawancara).....	29
2. Kuisisioner (Angket).....	30
3. Observasi	30
4. Dokumentasi.....	30
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	30
1. Analisis Data	30
2. Teknik Analisis	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36
1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian.....	36
2. Deskripsi Data Keuangan.....	36
3. Uji Asumsi Klasik	43
4. Analisis Data	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah untuk mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerahnya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Namun pemerintah daerah tetap harus menyinkronkan kebijakan yang diambil dengan kebijakan yang pemerintah pusat ambil. Sinkronisasi kebijakan ini menjadikan adanya keselarasan program-program prioritas yang dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Wahyuni (2008: 3) Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan keuangan daerah yang lebih besar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berkurangnya campur tangan pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

pemerintah daerah mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, efektif, efisien, demokratis dan akuntabel.

Rasio belanja modal pada total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja operasional dan belanja modal yang dialokasikan dalam anggaran daerah (Arsa, 2015: 4).

Menurut Todaro dalam Asepma (2015: 144) ada tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal disini erat hubungannya dengan investasi. Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi, maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Indikator besar kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Belanja modal seperti dalam belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya (Halim, 2016: 213)

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2016: 33). Dengan demikian terdapat keterkaitan antara alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan suatu daerah.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2016: 241) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seberapa besar kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lain digambarkan dalam rasio pertumbuhan ekonominya. Rasio pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari rasio pendapatan asli daerah, rasio total pendapatan daerah, rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan (Rahman, dkk 2014: 64).

Studi terdahulu yang dilakukan Arsa (2015) tentang pengaruh kinerja keuangan pada alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-provinsi bali tahun 2006 sampai dengan 2013

menunjukkan bahwa derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif pada belanja modal, ketergantungan keuangan berpengaruh negatif pada alokasi belanja modal, sedangkan kemadirian keuangan dan kontribusi BUMD tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang selama ini dilaksanakan ditentukan oleh alokasi belanja modal yang dilaksanakan pemerintah, dan semakin tinggi alokasi biaya modal yang dikeluarkan, maka dapat menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Asepma (2015) tentang Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau menunjukkan bahwa (1) Kinerja keuangan Kab/Kota di Provinsi secara langsung memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan sumbangan sebesar 59,29%, (2) Alokasi belanja modal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) Kinerja keuangan secara langsung memiliki signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan sumbangan 30,25%, dan (4) Kinerja keuangan secara tidak langsung (melalui alokasi belanja modal) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Fenomena yang menarik yang menjadi dasar penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Selatan mencatat bahwa *trend* belanja modal tahun 2014 hingga 2016, dimana belanja modal pada tahun

2014 sebesar Rp. 733.382 jutaan rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79%, belanja modal pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.037.584 jutaan rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,42%, belanja modal pada tahun 2016 sebesar Rp. 607.740 jutaan rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%. Menurut Sukirno (2016: 34) Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel I.1
Laporan Realisasi Anggaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2016

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Surplus/Defisit
2014	6.252.136.312.520	5.781.570.143.910	470.566.168.610
2015	5.889.206.929.216	4.495.777.508.204	1.393.429.421.012
2016	6.582.780.929.676	4.094.471.321.477	2.488.309.608.100

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel I.2
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2016

No	Jenis Belanja	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Belanja tidak langsung	4.010.619	3.108.721	3.564.656
2	Belanja Pegawai	23.441	5.368	4.314
3	Belanja barang dan jasa	1.041,127	1.017.947	785.861
4	Belanja Modal	733.382	1.037.584	607.704
Jumlah		5.781.570	5.169.621	4.962.572

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel I.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2016

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Ogan Komering Ulu	7.987,73	8.230,96	8.556,15
2	Ogan Komering Ilir	15.902,81	16.667,05	17.450,46

3	Muara Enim	29.041,81	31.254,50	32.892,45
4	Lahat	10.318,70	10.539,02	10.830,61
5	Musi Rawas	10.510,08	11.049,70	11.647,49
6	Musi Banyuasin	38.397,52	39.278,56	40.225,89
7	Banyuasin	15.380,59	16.236,00	17.190,46
8	OKU Selatan	4.503,08	4.707,44	4.951,26
9	OKU Timur	7.821,86	8.294,87	8.805,05
10	Ogan Ilir	5.858,66	6.118,42	6.431,68
11	Empat Lawang	2.836,12	2.963,80	3.098,26
12	PALI	3.577,35	3.736,27	3.930,64
13	Musi Rawas Utara	4.606,18	4.760,11	4.925,76
	Kota			
1	Palembang	78.091,09	82.345,07	87.088,35
2	Prabumulih	4.097,01	4.295,41	4.587,79
3	Pagar Alam	1.814,40	1.892,91	1.974,61
4	Lubuk Linggau	3.234,07	3.428,61	3.645,48
Jumlah 17 Kabupaten/Kota		243.979,06	255.798,70	268.232,39

Sumber: Data Diolah, 2018

Pada tahun 2015 belanja modal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 304.202 jutaan rupiah dengan presentase 41,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,37%. Pada tahun 2016 belanja modal mengalami penurunan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 429.844 dari tahun sebelumnya dengan presentase penurunan sebesar 41,4 % sedangkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,61%. (BPS, 2017).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah pada bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap penggunaan aset daerah provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan aktivitas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dibantu oleh ketua BPKAD.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti agar dapat memperbaiki kinerja keuangan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening provinsi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

4. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening.

5. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk agar dapat memperbaiki kinerja keuangan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

6. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2016. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asepma Hygi Prihastuti. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau*. Jurnal Sorot, Volume 10, Nomor 2 Oktober 2015.
- BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pemerintah). 2012. *Petunjuk Penyusunan Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Revisi)*.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2017. *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka*. BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Helly Aroza Siregar. 2016. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Kurs Volume 1 Nomor 1 Juni 2016.
- I Ketut Sida Arsa dan Nyoman Djinar Setiawina. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi Volume 20, Nomor 2: 104-112.
- Irham Fahmi. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta
- Jumingan. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara : Jakarta
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*: Jakarta: Salemba Empa
- Ni Luh Nana Ani Putri dan Dwirandra. 2014. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*. Jurnal Akuntansi. Vol.6 No.3.
- Ni Made Deni Indiyanti. 2014. *Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal di provinsi Bali*
- Novira Sartika. 2017. *Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pasal 53 tentang *Belanja Modal*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016 tentang *Klasifikasi Anggaran*
- Priyo Hari Adi. 2017. *Dampak Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis, Volume 3, Nomor 2 Desember 2017
- Rahman Mubarak, Farida Ratna Dewi. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Metode Economic Value Added (EVA)*. Jurnal Manajemen dan Organisasi. Volume 1, Nomor 2, Hal 107-117.
- Sucipto. 2013. *Penilaian Kinerja Keuangan*. Jurnal Akuntansi. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Sudono Sukirno. 2016. *Macro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kuantitatif dan R&D) (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang *Statistik*.
- Yoyo Sudaryo. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Andi